

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku :

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Edisi kedua, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- A.V. Dicey, 1952. *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, ST. Martin's Street, London: Macmillan And Co, Limited.
- B. Arief Sidharta. 1996 *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang layak*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons,.Dicey, A.V. 1885. *Introduction to The Study of The Law of Constitution*.
- Dwidjowijoto, Riant N 1991. *Organisasi Publik Masa Depan*, Jakarta : Penerbit PerPod.
- Ganie-Rochman, Meuthia, Artikel "*Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya*", dalam HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, Komnas HAM, Jakarta, 2000.
- Harry. 1996. *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Edisi kedua Yogyakarta: Kanisius.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Jose Endriga, 2002. *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal & Clean Government*, Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), Jakarta.
- Josef Riwo Kaho 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraanya* Jakarta : Rajawali Pers.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, Lembaga

Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000.

Miriam Budiardjo. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Mustopadidjaja. 1997 Paradigma-Paradigma Pembangunan: Dan saling hubungannya dengan model, strategi, dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, Jakarta.

Nisjar. 1997. Beberapa Catatan Tentang Good Governance, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol.1 NO.2 tahun 1997.

Nurul Huda 1998. Teori & Aplikasi Statistik Pendekatan Analisis Ekonomi Islam. Jakarta: Prenadamedia Group

Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya.

Ridwan, H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

S.F. Marbun, dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Sjahir. 2001 Stroke Iskemik. Medan: Yandira Agung

Syamsuddin Haris. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI, Jakarta

Rian Nugroho, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Gramedia

Romzek, B.S.& Dunbicvk, J.M.1990. Accountability in The Public Sector, Kumarian Press. Connecticut

Thoha, Miftha 1997. Kepemimpinan Dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tilaar 1995, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, Tera Magelang

II. Makalah/Jurnal Ilmiah/ Materi Kuliah:

Achmad Ali, *Materi Kuliah Konstruksi Teori Hukum*, S3 Angkatan 2005 Semester I Tahun 2005.

Addink, G.H., 2001. *Principles of Good Governance In An International And Comparative Law Perspective*. Surabaya paper. Disampaikan dalam "Workshop And Seminar On Good Governance" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya bekerjasama dengan Universitas Utrecht.

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. 2005.

Bhatt, P. R. and Bhatt, Rathish. *Corporate Governance and Firm Performance in Malaysia*. *Corporate Governance, The International Journal of Business in Society*, Vol. 17, 1999.

Hidayat, *Sekilas Tentang Pengawasan*, Majalah Keuangan, No. 125, Oktober 1984.

Philipus M. Hadjon, *Implikasi UU No. 9 Tahun 2004 Terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 2004.

Sjahrir. 2001. *Good governance Di Indonesia Masih Utopia Tinjauan Kritis Good governance*. Makalah. Jakarta.

Sri-Edi Swasono dalam artikelnya yang berjudul "Partisipasi" (Suara Merdeka, 15 Juni 1990)

Sunaryati Hartono dalam Lokakarya RUU Tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Makassar, 1 Juni 2005,.

Suplemen atas Pedoman Tentang Penyebarluasan Pengertian dan Kesadaran Pengawasan. Diterbitkan oleh Sekretariat Wakil Presiden RI, halaman 3.

Syahrir. 1986. *Pengamanan Dana dan Daya Negara*, Prisma, Maret, 1986.

Toronto Stock Exchange Committee on Corporate governance in Canada (1994)

iii. Harian/Berita

Harian Kompas, 13 Juni 2008

Harian Kedaulatan Rakyat, 18 April 2008

Harian Kompas, 17 Desember 2010

IV. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan nasional Tahun 2000-2004.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Himpunan Peraturan Pengawasan Masyarakat (seri 2), diterbitkan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Gowa.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Gowa

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 1996 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler Aparat Pengawasan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah kerjanya.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep.-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Instruksi Bupati Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Optimalisasi Peran Pengawasan Fungsional Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Instruksi Bupati Kabupaten Gowa Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan Pimpinan Unit Organisasi/Satuan Kerja Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gowa.